



Dinsos Minta Pemegang KMS Jujur

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Kota Yogyakarta selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerbitkan kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) angkat bicara terkait temuan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, di mana siswa KMS yang mendaftarkan sekolah memiliki barang mewah.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat, mengucapkan terima kasih atas koreksi sosial

yang dilakukan pihak Forpi. Ia menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum yang tidak seharusnya menggunakan KMS, karena KMS hanya diperuntukkan bagi warga kota yang belum sejahtera atau miskin.

"Kalau ada temuan, akan diklarifikasi betul apakah info ini benar. KMS ini untuk saudara kita yang tidak mampu. Kalau sampai begini, mereka mengambil hak orang lain yang tidak mampu. Maka di sini diperlukan kejujuran dan peran sera mas-

asyarakat. Kejujuran pada saat memberikan data yang benar, jangan dilebih-lebihkan dan masyarakat memberi masukan juga ke kami," urainya, Selasa (2/7).

Ia menjelaskan, bahwa pemegang KMS yang merupakan anggota jaminan perlindungan sosial memiliki kriteria dan ditetapkan melalui mekanisme.

"Ada komunikasi dan sosialisasi RT, RW, Kelurahan, Kecamatan. Ini untuk konfirmasi

data sasaran dan ini nanti diuji publik. Minta pendapat RT/RW apakah sasaran sudah betul. Lalu Mei-Juni ada pendataan terhadap semua data yang sudah masuk, pengecekan, dan sebagainya. Lalu ada konfirmasi dengan tatap muka," ucap Agus.

Kriteria KMS, lanjutnya, mencakup 7 aspek. Mulai dari aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sementara untuk param-

● ke halaman 15

Dinsos Minta Pemegang KMS

● Sambungan Hal 9

eter meliputi 16 hal dengan bobot yang berbeda. Mulai dari suami-istri yang tidak bekerja, pendapatan rata-rata selama sebulan maksimal Rp400 ribu per orang, status kepemilikan bangunan masih sewa, kepemilikan barang tidak lebih dari Rp 1,8 juta, dan sebagainya. "Kalau punya barang dengan harga lebih dari Rp 1,8 juta, berdasarkan pendapat ahli kalau lebih dari itu maka sudah tergolong mampu," ungkapnya.

Saat ini Dinas Sosial Kota

Yogyakarta sedang melakukan proses pendataan KMS untuk tahun 2020. Uji publik pertama telah dilakukan pada April lalu dan uji publik kedua rencananya dilakukan pada Oktober mendatang.

"Usulan wilayah yang baru untuk KMS ada sekitar 5.004 KK dengan uji publik kedua sebagai dasar apakah masuk kriteria miskin atau masuk sejahtera. Kalau sudah sejahtera akan dicoret," bebernya.

Dinas Pendidikan Yogyakarta memilih tidak berspekulasi terlalu jauh perihal temuan calon siswa membawa ponsel serta orang tua mengendarai sepeda motor dengan harga di atas Rp20

juta tapi memegang KMS saat proses verifikasi PPDB jalur Zonasi Mutu.

Seperti diketahui, saat ini sedang memasuki fase Pendaftaran PPDB jenjang SMP di Kota Yogyakarta untuk jalur Zonasi Mutu. Dalam zonasi mutu tersebut, nilai USBN menjadi penentu siswa diterima di sekolah.

Termasuk di dalam jalur zonasi mutu adalah warga tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu KMS. Kuota keseluruhan untuk zonasi jalur mutu 40 persen. Terkait sistem ini, Forpi Kota Yogyakarta mendapati beberapa orang tua pemegang KMS tapi terlihat mampu dari ponsel yang digunakan dan

kendaraan yang dipakai.

Pt Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori saat dihubungi Senin (1/7) menjelaskan, sudah ada parameter khusus yang mengatur seseorang berhak menjadi pemegang KMS yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.

"Syarat-syaratnya sudah ada yang mengatur. Nah, di sini bukan ranah kami melakukan validitas para pemegang KMS. Kami juga tidak bergerak sejauh itu untuk kemudian melakukan verifikasi setelah proses pendaftaran. Kami berpegang pada bukti hitam di atas putih saja," kata Budi. **(kur/sus)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005